

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penting bagi suatu daerah untuk memiliki pemimpin yang mengurus segala hal didaerah tersebut. Masyarakat pun tidak sembarangan dalam hal menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka. Banyak faktor yang menentukan untuk dipilihnya pemimpin tersebut, salah satunya adalah asal usul atau latar belakang sang calon pemimpin. Pada umumnya pemimpin yang dipilih oleh masyarakat berasal dari latar belakang golongan mayoritas yang mendiami wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyaknya lapisan masyarakat hidup di zaman yang dewasa ini dengan semangat primordialisme yang kental baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Masyarakat primordial sendiri menurut Gertz umumnya memiliki ciri kecenderungan mengutamakan kelompok, suku, agama, budaya, dan rasnya.¹

Salah satu contohnya adalah presiden Indonesia. Presiden Indonesia dari awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 2014 hanya satu yang berasal dari luar Jawa yaitu B.J Habibie yang tepatnya berasal dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Hal ini membuktikan bahwa dari 7 Orang yang menjadi presiden Republik Indonesia, 6 diantaranya berasal dari suku Jawa. Hal ini sangat mengherankan mengingat Indonesia merupakan negara luas yang memiliki berbagai macam suku etnik yang kurang lebih mencapai 761 etnik (subetnik) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pada data kependudukan

¹ Dany Haryanto & G. Edwi Nugrohoadi, *Pengantar Sosiologi Dasar* (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2011), hlm. 169.

menurut sensus tahun 2010, pulau jawa menduduki peringkat pertama sebagai pulau dengan presentase jumlah penduduknya mencapai 57,49%. Jika demikian, maka calon presiden yang berlatar belakang dan berasal dari pulau Jawa mempunyai peluang untuk menang, walaupun tidak semua orang Jawa akan memilih calon presiden berlatar belakang Jawa. Akan tetapi kebiasaan dan tabiat orang Jawa adalah tidak akan memberikan sesuatu kepada orang lain jika tetangga dan sekitarnya masih ada yang membutuhkan, karena prinsipnya adalah *guyup lan rukun*. Selain itu juga jika ditarik ke ranah agama, agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Maka dari pertama sampai sekarang kita bisa menyebutkan bahwa presiden Indonesia jika diamati merupakan orang Jawa yang beragama Islam yang merupakan suku dan agama mayoritas di Indonesia.

Namun pada saat ini terdapat satu fenomena menarik yaitu dipimpinnya suatu daerah oleh kaum minoritas. Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok pada saat ini merupakan Gubernur DKI Jakarta. Walaupun Basuki Tjahaja Purnama menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan berasal dari pemilihan umum secara langsung melainkan karena menggantikan Joko Widodo yang sebelumnya Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta menemani Joko Widodo. Namun sampai saat ini Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih duduk di bangku kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memiliki masa kepemimpinan sampai tahun 2017.

Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal Ahok merupakan orang yang berasal dari etnik Tionghoa dan beragama Kristen. Jakarta sendiri

merupakan daerah yang memiliki penduduk multikultural, berbagai suku terdapat di Jakarta, namun suku asli Jakarta adalah Suku Betawi. Etnik Tionghoa sendiri merupakan salah satu suku minoritas di Jakarta. Tidak ada jumlah pasti etnik Tionghoa yang merupakan penduduk DKI Jakarta, namun di beberapa website menyebutkan presentase Etnik Tionghoa di Jakarta pada saat ini sebesar 5,53%² atau kurang lebih berjumlah 563.374 orang dari 10.187.595 jiwa penduduk DKI Jakarta.³ Sedangkan pada data sensus penduduk tahun 2000, etnik Tionghoa menduduki peringkat enam sebagai etnik terbesar di Indonesia dengan jumlah 4.222.936 jiwa atau 2,1% dari jumlah penduduk Indonesia saat itu.⁴

Etnik Tionghoa di Indonesia sendiri mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Pada masa orde baru, pemerintahan presiden Soeharto menjalankan kebijakan yang disebut asimilasi.⁵ Kebijakan ini membuat etnik Tionghoa kemudian berbaur dengan masyarakat Indonesia. Perbauran itu dibuktikan dengan banyaknya orang Tionghoa yang merubah namanya menjadi nama Indonesia. Kebijakan asimilasi juga menimbulkan sikap antipati warga pribumi terhadap orang keturunan Tionghoa. Pemerintahan orde baru membatasi “gerak” warga keturunan Tionghoa, hal ini dilakukan dengan cara pelarangan Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin. Bahkan satu-satunya surat kabar berbahasa

²<http://kum.kim/topic367.html> (Diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 13.28 WIB)

³<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/31/dki-jakarta> (diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 17.35 WIB)

⁴ M.D. La Ode, *Etnik Cina Indonesia dalam Politik: Politik Etnik Cina Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 4.

⁵ Leo Suryadinata, *Etnik Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 210.

Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini surat kabar tersebut dikelola dan diawasi oleh ABRI. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga keturunan Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air.

Pada masa akhir dari Orde Baru, tepatnya tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan Solo terjadi peristiwa kerusuhan anti Tionghoa secara besar-besaran yang merupakan peristiwa terkelam bagi masyarakat Indonesia terutama warga keturunan Tionghoa.⁶ Kerusuhan tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban bahkan banyak di antara mereka mengalami pelecehan seksual, penjarahan, kekerasan, bahkan pembunuhan. Kerusuhan tersebut membuat masyarakat keturunan Tionghoa mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Bagi mereka yang mampu mengungsi ke luar negeri, tetapi sebagian besar tetap berdiam di Indonesia dengan kebingungan dan keputusasaan.

Hal ini juga menyebabkan ketakutan yang luar biasa masyarakat keturunan Tionghoa untuk memasuki dunia perpolitikan, karena akibat trauma dari kejahatan politik pada masa periode akhir pemerintahan Soekarno dan awal-awal tahun pemerintahan Orde Baru Soeharto masih cukup kuat yaitu tidak dipercayanya orang Tionghoa Indonesia didunia perpolitikan dan terjadinya kasus G30SPKI yang membuat orang Tionghoa Indonesia di cap sebagai komunis oleh masyarakat pribumi. Hal ini pula yang menyebabkan berdirinya organisasi Tionghoa bernama Perhimpunan Indonesia Tionghoa

⁶Leo Suryadinata, *loc.cit.*

(INTI) yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap WNI keturunan Tionghoa.

Namun sekarang banyak etnik Tionghoa memasuki dunia perpolitikan salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Beliau dianggap sebagai pemimpin yang tegas dan berwatak keras, bahkan cenderung memiliki emosi yang tidak terkontrol dengan ucapan-ucapannya. Hal ini membuat warga Jakarta melihat bahwa sikap Basuki Tjahaja Purnama terkesan berlebihan. Namun kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama bisa dibalang cukup bagus dengan perlahan membenahi Jakarta. Mulai dari membersihkan pedagang dipinggir jalan Tanah Abang, menggusur rumah-rumah liar di kampung pulo untuk normalisasi kali, membuat aplikasi pengaduan masyarakat, hingga peningkatan kinerja pegawai negeri sipil PEMPROV DKI Jakarta. Hal ini yang membuat sebagian warga Jakarta tidak mempermasalahkan cara kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama yang berwatak keras dan memiliki komunikasi yang buruk dengan lembaga lain karena walaupun emosian, namun hasil kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta terlihat. Dukungan pun terus mengalir kepada Basuki Tjahaja Purnama agar terus memperbaiki Jakarta. Bagi Basuki Tjahaja Purnama, lebih manusiawi marah secara langsung walaupun kelihatannya kasar daripada berdiam diri, atau berpura-pura santun padahal munafik dan mengorbankan orang lain. Prinsip dari keberanian Basuki Tjahaja Purnama semata-mata ingin mengembalikan kebenaran ke tempat yang sesungguhnya. Marah demi kepentingan rakyat lebih terhormat daripada santun dalam keapatisan.⁷

⁷ Piter Randan Bua, *The Ahok Way – Hidup adalah Kebenaran mati adalah keuntungan* (Jakarta : PT Visi Anugerah Indonesia, 2014), Hlm. 20.

Namun ada salah seorang etnik Tionghoa bernama Lieus Shungkharisma yang tidak mendukung kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Lieus mengaku risau dengan gaya Basuki Tjahaja Purnama selama menjadi Gubernur Jakarta. Sebab, selain sering mengumbar sumpah serapah Basuki Tjahaja Purnama juga dinilai menebarkan permusuhan, caci maki serta berperilaku kasar sehingga mencoreng citra orang-orang Tionghoa.⁸ Bahkan Lieus mengungkapkan warga keturunan Tionghoa minta Basuki Tjahaja Purnama (Basuki Tjahaja Purnama) tak ikut pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Hal ini cukup aneh mengingat Basuki Tjahaja Purnama dan lieus berasal dari sama-sama satu etnik yaitu Tionghoa. Sebagai suatu penelitian, penting untuk diketahui lebih dalam bagaimana sikap sebenarnya etnik Tionghoa terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan etnik Tionghoa yang menolak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama?
2. Bagaimana persepsi etnik Tionghoa terhadap terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta?
3. Bagaimana sikap sebenarnya etnik Tionghoa terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama?

⁸[http://www.teropongsenayan.com/19908-hanya-satu-kata-lieus-untuk-Basuki Tjahaja Purnama-cukup](http://www.teropongsenayan.com/19908-hanya-satu-kata-lieus-untuk-Basuki-Tjahaja-Purnama-cukup) (Diakses pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 8.24 WIB)

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi, dalam penelitian ini berupaya meneliti bagaimana sikap sebenarnya etnik Tionghoa terhadap kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan di organisasi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di daerah Mega Glodok, Kemayoran, Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap sebenarnya etnik Tionghoa yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) terhadap kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta yang merupakan orang Tionghoa juga.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Sikap etnik Tionghoa terhadap kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta?

E. Kegunaan Penelitian

a) Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan penulis dalam memahami sikap manusia, pemahaman mengenai etnik Tionghoa, dan kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta.

b) Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui mengenai sikap suatu etnik dalam mendukung atau mengkritik pemimpin yang berasal dari satu etnik yang sama. Serta dapat mempelajari kedepannya dalam memilih seorang pemimpin.

c) Bagi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI)

Bagi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), penelitian ini bisa sebagai gambaran mengenai sikap anggota Perhimpunan INTI terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang juga berasal dari satu etnik, yaitu etnik Tionghoa. Selain itu juga bisa dijadikan acuan bagi Perhimpunan INTI dalam memahami serta mempelajari perilaku etnik Tionghoa dalam aktivitas politik di Indonesia pada saat ini.